BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasar nya manusia adalah khalifah di muka bumi baik laki-laki maupun perempuan. Dengan tugas untuk memakmurkan bumi serta mensejahterakan manusia. Dalam Islam, *al-siyasah* (politik) di artikan adalah sebuah cara untuk mengatur semua urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Islam adalah agama yang damai yang melindungi hak-hak manusia dengan tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Karena hakekatnya, hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah dua konsep, yaitu jenis kelamin dan *gender*. Perbedaan dari jenis kelamin ini mengacu pada perbedaan fisik. Sedangkan gender itu sendiri adalah tafsiran atas perbedaan jenis kelamin.[1] Menurut Mansour Fakih *gender* di definisikan sebagai pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial. Sebab itu, gender tersebut bukanlah suatu kodrat yang ditetapkan oleh Tuhan, akan tetapi gender adalah suatu pembedaan yang di sosialisasikan dalam jangka waktu panjang.

Gender dalam artiannya adalah hal yang berkaitan dengan proses keyakinan pola fikir laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hal

[1]Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tindakan sesuai dengan sosial dan budaya dimana mereka berada. Hal yang menentukan terjadinya pembedaan tersebut terdapat pada aturan masyarakat itu sendiri, tidak pada perbedaan biologis.[2] Islam sendiri mengakui adanya *distinction* (perbedaan) antara laki-laki dan perempuan, bukan *discrimination* (pembedaan). Perbedaan ini adalah dimana untuk membedakan secara fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut bukan untuk memuliakan atau merendahkan antara laki-laki ataupun perempuan.[3]

Ulama *salaf* maupun ulama kontemporer sendiri sepakat bahwa posisi perempuan disetarakan dengan laki-laki dalam posisi ciptaan sekaligus hamba Allah. Sebagai hamba Allah perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki beberapa hak dan kewajiban di antaranya hak untuk menikmati usahanya, hak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu. Ironisnya ketika pola relasi perempuan dan laki-laki ditarik ketataran oprasional yang bersifat praktis. Muncul perdebatan panjang sepanjang sejarah manusia itu sendiri.[4]

Namun tampaknya hal itu tidak terjadi untuk masyarakat Sampang yang mayoritas sendi-sendi kekuasaan lebih banyak dikuasai oleh seorang tokoh masyarakat yakni Kyai dengan kekuatan pesantrennya atau kaum

---

[2]Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 157-158.

[3]Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 22.

[4]Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 58-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki. Dominasi kekuatan politik di kabupaten Sampang yang masih di pegang oleh kedua pemegang kekuasan tersebut rupanya menjadi kendala tersendiri bagi kaum perempuan Sampang yang ingin terjun keranah politik. Dalam peran perempuan di ranah publik, yaitu dunia politik, banyak kendala yang dialami oleh kaum perempuan baik kendala kultural maupun struktural dikarenakan perempuan masih di anggap tidak pantas untuk ikut serta dalam ranah politik. Kendala yang terjadi seperti kendala struktural, hal ini berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi dan pekerjaan. Pekerjaan perempuan secara umum lebih berkisar pada penyelesaian tugas domestik kerumah tanggaan dan cendrung identik dengan pekerjaan "kelas dua" yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sementara kendala kultural dengan faktor budaya masyarakat yang memaknai perempuan hanya untuk tinggal di dalam rumah saja.[5] Mengingat umumnya sebagian besar kyai dan masyarakat sampang masih berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam dalam realitas kehidupan sosial budaya nya. Dimana perempuan di ranah publik masih di anggap tidak pantas untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik, karena paham yang dianut tidak mungkin seorang perempuan menjadi seorang pemimpin dan memimpin kaum laki-laki. Hal tersebut seakan memberikan pembenaran tersendiri atas penempatan perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik serta melanggengkan budaya patriarki dalam kehidupan bermasyarakat.

[5]Hesti Amirwulan, *Menggugat Hak Politik Perempuan*, (Surabaya: Lutfansah, 2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang sendiri ialah struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan privilige di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender. Dengan kata lain, budaya patriarki adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial.

Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang di aplikasikan dalam kehidupan sosial.

Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini timbul dari adanya kepercayaan terhadap Tuhan dalam suatu agama, dan kemudian muncul kesan yang telah terpatri dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa Tuhan adalah laki-laki.

Peneliti beranggapan bahwa problematika utama yang dihadapi perempuan, dimulai saat dia memutuskan untuk terjun ke ranah politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masuknya perempuan ke dalam sebuah tradisi atau budaya politik yang telah lama terkonstruksi secara patriarki menjadi faktor utama yang menjadi hambatan bagi perempuan secara nyata untuk berkiprah secara total di dunia politik.

Selain itu dikalangan masyarakat Sampang juga terdapat sebuah komplikasi yang diberikan oleh laki-laki dalam memaknai posisi kaum perempuan di Kabupaten Sampang. Di satu sisi, perempuan adalah kaum yang sangat dihargai, dihormati dan dilindungi. Kaum perempuan diberikan keistimewaan secara finansial dan sangat dimuliakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Namun di sisi lain, hal itu secara implicit menempatkan posisi perempuan di ranah domestik. Penempatan semacam itulah yang dijadikan alasan bagi kaum laki-laki untuk menghambat kiprah perempuan di ranah publik dalam hal ini bidang politik. Dan kesadaran untuk berkecimpung di luar ranah domestik bagi kaum perempuan sangat sulit sekali ditumbuhkan. Mengingat kuatnya hegemoni dan dominasi kaum laki-laki serta ditambah dengan pembenaran sistem semacam itu oleh budaya dan sistem keagamaan.

Dalam kehidupan masyarakat Sampang yang tradisi kulturalnya masih sangat kental akan kereligiusan dalam memeluk agama Islam, umunya akan mencari dasar pembenarnya berdasarkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang bersifat umum yang di yakini, baik nilai yang berasal dari budaya, adat maupun agama. Dan umumnya pola pikir masyarakat Sampang yang masih tradisional dan masih mengedepankan pendapat kyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berbagai urusan termasuk dalam urusan politik maka akan menjadikan Kyai sebagai satu-satunya tujuan untuk mencari pembenaran itu, umumnya Kyai yang ada di Sampang sebagian besar memiliki pondok pesantren.[6]Sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri yang membuat perempuan sulit untuk menapaki karir di ranah politik, khususnya pada perempuan yang memiliki latar belakang pondok pesantren.

Di pesantren, budaya yang digunakan berbasis agama sebagai rujukan dari kehidupan sosial, hampir semua perilaku pribadi dan sosial yang dilakukan selalu merujuk pada teks agama. Bidang ini masih sulit untuk dimasuki oleh mayoritas aktivis perempuan untuk melakukan pembelaan. Hal ini dikarenakan mayoritas laki-laki pesantren tidak hanya di fungsikan dalam hal budaya kepesantrenan saja, akan tetapi prilaku laki-laki pesantren sangat kental dengan ajaran agama. Nilai-nilai dan pokok dasar kehidupan pesantren semuanya mengacu pada ajaran dan perintah-perintah agama,[7]sebagaimana yang telah ditetapkan dalam literatur wajib di dalamnya.

Dalam struktur kekuasaan tertinggi pesantren dipegang oleh seorang Kiai. Ajaran yang kental dalam dunia pesantren adalah ajaran kitab kuning yang menjadi rujukan utama budaya pesantren dalam memahami agama dan menjadi landasan kehidupan juga menjadi faktor

[6]Ari Darmastuti, *Perempuan, Politik dan Islam,* dalam *Analisis Jurnal Studi Keislaman* Vol. 4 No. 2 Tahun 2004, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004), 194.

[7]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren,* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dominan dalam memberikan semangat hidup masyarakat pesantren.[8] Kitab kuning dianggap sebagai sebuah doktrin agama, karena tradisi pesantren memandang kitab kuning karya para ulama besar yang berisi teks suci, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang ditafsirkan secara *tekstual* sebagai kebenaran dan kebaikan yang datang dari agama. Pandangan lain tentang kitab kuning di pesantren adalah kitab kuning terlalu mengesampingkan perempuan, karena kitab kuning memandang perempuan hanya sebagai objek saja yang misalnya laki-lakilah yang berhak menikahi perempuan, yang artinya adalah bahwa laki-lakilah yang berhak memilih perempuan mana yang akan ia nikahi, sebaliknya perempuan tidak dapat memilih laki-laki mana yang akan ia nikahi, perempuan hanya dapat menerima atau menolak.[9] Sejumlah kendala lain juga masih menghadang kaum perempuan dalam berkiprah di dunia politik seperti halnya diskriminasi/memandang rendah orang lain berdasarkan jenis kelaminnya, dan yang sering mengalami diskriminasi ini adalah para perempuan. Laki-laki yang berada di ranah politik tidak pernah menemukan kendala apapun dalam penampilan mereka lain halnya dengan perempuan yangselalu dinilai dari sisi penampilan fisik, cara bicara, cara berbusana dan pola berpikir mereka.[10]

Hal itu terjadi karena sebagian besar kyai-kyai Sampang yang umumnya memiliki pesantren memandang jika perempuan ada di ranah

[8] Ibid. 28

[9]Masdar F. Mas'udi, *Perempuan Di Antara Lembaran Kitab Kuning,* (Jakarta: INIS, 1993), 157

[10]Siti Musdah Mulia & Anik Farida, *Perempuan dan.....,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik merupakan hak yang tabu, seolah-olah perempuan tidak boleh berada diranah politik dan menjadi seorang pemimpin. Namun seiring berkembangnya zaman tampaknya kyai yang memiliki pondok pesantren Nazhatut Tullab Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mulai menujukkan perubahannya dalam memandang seorang perempuan di ranah politik, Hal ini dapat dilihat dari keikut sertaannya dalam mengizinkan anggota keluarganya dengan mencalonkan anak perempuan dari pesantren Nazhatut Thullab untuk menjadi anggota legislatif hal tersebut dimulai sejak tahun 2005 dimana Nyai Zairina mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat kabupaten di sampang namun saat itu tidak terpilih dan barulah pada preode selanjutanya yakni preode 2009-2014 beliau terpilih menjadi anggota legislatif di kabupaten sampang kemudian pada priode selanjutnya yakni pada tahun 2014 Nyai zairina kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif namun kejenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat profensi, tidak hanya itu pesantren Nazhatut Thullab juga menganjurkan masyarakat sekitar dan para alumninya laki – laki terutama perempuan untuk menjejakkan kaki lebih luas untuk ikut berpartisi pasi di ranah politik. Hal ini terjadi karena pondok pesantren tersebut menilai campur tangan ulama dan perempuan berlatar belakang pesantren dalam berbagai aktifitas politik diharapkan dapat memperbaiki citra kondisi perpolitikan Indonesia yang dianggap kotor dalam memenuhi kuota 30% perempuan dalam politik terutama di dalam lembaga perwakilan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari wacana diatas pesantren Nazhatut Thullab seakan memberi kesempatan terhadap perempuan dari kalangan apapun untuk bisa ikut serta dalam panggung politik. Hal tersebut juga seolah tidak membenarkan penilaian tentang perempuan yang terjun diranah politik yang dalam konteks pesantren, perempuan dikonstruksi (dibentuk) dengan legitimasi dari dalil agama. Perempuan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjadi ibu rumah tangga untuk mengabdi kepada suami, sebagaimana seperti yang diajarkan dalam kitab- kitab turats.

Tentu saja bagi masyarakat Sampang, perempuan pesantren, yang tampil dalam, lingkungan publik terutama di ranah politik merupakan hal yang baru. Karena uraian pembahasan latar belakang masalah inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Makna Perempuan di Ranah Politik Bagi Komunitas Pesantren Sampang dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014-2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pandangan komunitas pesantren Nazhatut Thullab dalam memaknai perempuan di ranah politik?
2. Bagaimana perubahan penerimaan komunitas Pesantren Nazhatut Thullab terhadap perempuan diranah politik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hambatan apa yang ditemui oleh perempuan pesantren Nazhatut Thullab untuk menjadi anggota legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu mengetahui secara aktual dan faktual mengenai Pandangan Komunitas Pesantren Nazhatut Thullab Bagi Perempuan di Ranah Politik. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan komunitas pesantren Nazhatut Thullab dalam memaknai perempuan di ranah politik
2. Untuk memahami perubahan komunitas pesantren Nazhatut Thullab Terhadap perempuan di ranah politik.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh perempuan pesantren untuk dapat menjadi anggota legislatif.

D. Kegunaan Penelitian

Dari beberapa informasi yang telah diperoleh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial disamping memberikan gambaran informasi mengenai partisipasi politik perempuan pesantren dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan politik. Sehingga di kemudian hari, dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang lebih lanjut dan mendalam.

b. Praktis

Sedangkan dalam segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan jelas mengenai makna perempuan di ranah politik bagi pesantren Nazhatut Tullab, dan juga dapat bermanfaat bagi kalangan pesantren khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Tinjauan Penelitian

Penelitian mengenai perempuan dan politik telah banyak dilakukan dengan fokus yang berbeda-beda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. So'idah, *Peranan Wanita Dalam Bidang Politik di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam,* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002. Hukum Islam membolehkan wanita untuk memegang peranan dalam dunia politik pada masa sekarang ini jika dia memang mempunyai potensi dan mampu menangani di di bidang politik tersebut, tanpa berbenturan dengan kemaslahatan umat dan keluarga.
2. Tri Ainur Romzah, *Partisipasi Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Keterlibatan Elit Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto Dalam Pemilu Tahun 2009,* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Partisipasi elit politik perempuan di Kabupaten Mojokerto terbagi dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan dan aktivis. Motif berpartisipasi elit politik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Mojokerto merupakan motif rasional dan bernilai dan keikutsertaan mereka dengan berpartisipasi atas dasar pertimbangan rasional.

3. Jurnal Perempuan, 2004, Wijaksana, "Perempuan dan Politik". Konstitusi india juga menjamin bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan atau jabata-jabatan dalam kantor-kantor pemerintahan. Bahkan untuk keterwakilan perempuan dalam politik konstitusi india jauh lebih progresif dibandingkan dengan Negara-negara lain di asia. Jika di Indonesia keterwakilan itu di atur oleh peraturan setingkat undang-undang, itupun dengan sebuah "pasal karet", maka konstitusi india sudah dengan tegas menjamin perempuan akan menempati perwakilan tingkat desa atau local yang disebut Panchahayat seperti dari seluruh anggota parlemen. Konstitusi banglades juga menjamin hak-hak fundamental warga Negara termasuk perempuan pada Bagian II tentang Fundamental Principles of State Policy (prinsip-prinsip dasar kebijakan Negara. Di belahan asia tenggara terdapat Filipina dan Vietnam yang juga telah mengadopsi pasal-pasal khusus bagi keadilan gender di dalam konstitusinya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi, maka dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari subbab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I berisi Pendahuluan. Bab ini adalah permulaan dari pembahasan skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Kerangka Koseptual dan Teori yang terdiri dari makna perempuan, di ranah politik bagi komunitas pesantren Nazhatut Tullab.

Bab III mendeskripsikan *setting* penelitian yang meliputi lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Nazhatut Tullab Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, yang meliputi letak geografis, demografis, dan lain sebagainya.

Bab IV analisis hasil penelitian tentang pandangan komunitas pesantren Nazhatut Thullab bagi perempuan di ranah politik.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id